

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

Abdul Hakam Sholahuddin, *Hukum Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Sada Kurnia Pustaka. 2023

Ahmad Siboy. *Pengantar Hukum Pilkada*. Depok: Rajawali Pers, 2022.

Arianto, Bismar, Oksep Adhayanto, Winata Wira, Nurhasanah, Sekar Nur Wulandari, Eki Darmawan, dan Pery Rehendra Sucipta. *Desentralisasi Fiskal: Reformulasi Kebijakan Dana Alokasi Umum bagi Daerah Kepulauan*. Tanjungpinang: Laboratorium Komunikasi & Sosial, 2021.

Arief. Hanafi. *Penemuan Hukum*. Sleman, D.I. Yogyakarta. Ruang Karya Bersama 2024

Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*. Sleman, D.I Yogyakarta. Cv. Budi Utama, 2021.

Fahmi, Khairul. *Hak Pilih dalam Pemilihan Umum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2023

Jimly Assidique, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2026

Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Partai Politik*. Jakarta: Kencana, 2020.

Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kenacana, 2022.

Litbang Kompas. *Pilkada Ketegangan Hasil Pilkada Sulsel*. Jakarta: Kenacana, PT. Kompas Media Nusantara, 2024.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020

Pita Anjasari, *Perempuan dan Persepsi Politik*. Yogyakarta: CV. Detak Pustaka, 2025.

Saputra, Kurniawan Eka. *Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu Daerah: Adaptasi dan Inovasi Pasca Keresentakan*. Yogyakarta: Penerbit Adab, 2024.

Steffen Stevanus Linu, dan Irene Realytahaldy Troso Tangkawarow. *Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah. Manado: Penerbit Jurusan Pendidikan Geografi, Universitas Negeri Manado. 2025*

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet 5. Bandung: CV. Alfabetha 2023.

Tata Kelola Keuangan Pilkada Jawa Barat 2024. Bandung: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. 2025

Wimmy Haliim (Ed.). *Merajut Harapan, Meratapi Kenyataan: Geliat Politik Lokal dan Pilkada 2024*. Malang: Yayasan Lumbung Cendikia Insani. 2024

B. Jurnal

Adhayanto, Oksep, Fitri Kurnianingsih, Nurhasanah, Lamidi, dan Nur Hafifa. "Constitutional and Legal Framework for Marine Resource Utilization in Indonesia Towards a Sustainable Maritime Policy in Kepulauan Riau." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1559 (2025).

Agustapa, Agustapa Komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Sebagai Pelaksana Pemilu yang Berintegritas dalam Menjamin Prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Et al. "Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman". *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no.2 (2024): 1-17

Andrijulianti Popy Ibrahim, "Otoritas Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Kasus Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2024 di Kota Parepare ,(2025)

Biroroh Ta'mirotul dan Muwahid. Optimalisasi Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam* 2, no.2 (2020): 365-384

Djumikasihm, D. "Model Pencantuman Asas Hukum dalam Pembentukan Hukum Perikatan Nasional". *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 771

Fathul Mu'in, "Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran dalam melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang Undang.

- Fauzana, "Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesamaan Barat dalam Pembentukan Panitia Penyelenggara Pemilu" *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal* 4, no.1 (2022)
- Guruh Tio Ibipurwo. (2025). Konsep Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Sengketa Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. *Jurnal Hukum Respublica*, 25(1).
- Hasibuan, H.A Lawali dan Alvin Hamzah Nst. "Metode Penafsiran Hukum sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki." *Jurnal Legisla* 15, no.2 (2023): 136-145
- Khalisa Aisyah Signora et al., "Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan* 2, no. 1 (2023): 1–22, <https://doi.org/10.61721/educandumedia.v2i1.193>.
- Pariadi, Damayanti, G.A.R., & Rifai, A. "Aspek Yuridis Kedudukan Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" *Unizar Recht Journal (URJ)* 2, no.2 (2023) hal. 420-429
- Supriyadi, Andi Intan Purnamasari, dan Darmiati. (2023). Konseptualisasi Klinik Penegakan Hukum Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 6(1), 49–58.
- Syafriadi and Selvi Harvia Santri, "Analisis Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu" *Reformasi* 13, no.1 (2023) : 42-47.
- Silalahi, Wilma "Integritas Dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu Yang Demokratis," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, No. 1 (2022): 71–83. Hal. 94.
- Sumentana Made, I Nyonya Iemes, I Nyonya Gede Remaja "Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Pelaksanaan Penegakkan Hukum Terkait Tindak Pidana Pemilihan Umum Studi pda Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng" *Jurnal Hukum* 9 no. 2(2021). Hal. 25-53
- Supena, Cecep Cahaya "Manfaat Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum." *Jurnal MODERAT*, 8, no.2 (2022) Hal 427-435

Sofwatillah, Risnit dan Syahran Jailani, etl. “Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif Dalam Penelitian Hukum”. Jurnal Genta Mulia, no.2 (2024): 79-91 hal.8

C. Skripsi

Muhammad Revy Putra Kholik, *Peran Bawaslu dalam Menangani Pemilihan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada 2020 di Kabupaten Muaro Jambi* (Skripsi S1, Universitas Jambi, 2023).

D. Makalah

Hamdi Muchlis. “State Auxiliary Bodies di Beberapa Negara.” In Makalah “Penetapan State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan. Surabaya Departemen Hukum Tatanegara dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, n.d

E. Internet

“Gubernur Kepri Dorong Kepala Daerah Bersinergi Untuk RUU Daerah Kepulauan.” *Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau*. Terbit 29 Desember 2021. Diakses 2 Mei 2025. <https://kepriprov.go.id/berita/pemprov-kepri/gubernur-kepri-dorong-kepala-daerah-bersinergi-untuk-ruu-daerah-kepulauan>.

Badan Pusat Statistik, “Indeks Kemahalan Konstruksi, 2022-2024,” diakses 26 Februari 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTI4IzI=/indeks-kemahalan-konstruksi.html>

Badan Pusat Statistik, “Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2024,” diakses 26 Februari 2025, <https://sumsel.bps.go.id/id/statisticstable/3/VUZwV01tSlpPVlpsWIRKbmMxcFhhSGhEVjFoUFFUMDkjMw==/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-selatan--2023.html?year=2024>

Pemungutan Suara Ulang di Kota Tanjungpinang berjalan Aman dan Lancar | Bawaslu <https://tanjungpinangkota.bawaslu.go.id/berita/pemungutan-suara-ulang-di-kota-tanjungpinang-berjalan-aman-dan-lancar>.

Apa Itu PSU Pemilu? Ini Pengertian, Syarat, hingga Prosedur Pelaksanaan," Detiknews, 14 Februari 2024, diakses 11 Mei 2025,

<https://news.detik.com/pemilu/d-7154909/apa-itu-psu-pemilu-ini-pengertian-syarat-hingga-prosedur-pelaksanaan>.

Pemungutan Suara Ulang di Kota Tanjungpinang berjalan Aman dan Lancar | Bawaslu <https://tanjungpinangkota.bawaslu.go.id/berita/pemungutan-suara-ulang-di-kota-tanjungpinang-berjalan-aman-dan-lancar>.

Pratiwi Eka Putri, “Tiga Elemen Penentu Kesuksesan Pemilu,” Badan Pengawas Pemilihan Umum, 4 April 2019, <https://www.bawaslu.go.id/berita-tiga-elemen-penentu-kesuksesan-pemilu>.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), “Tugas, Wewenang dan Kewajiban,” *Bawaslu Kabupaten Manokwari*, diakses 12 Mei 2025 <https://manokwari.bawaslu.go.id/tugas-wewenang-dan-kewajiban-Bawaslu-Kabupaten/Kota-bertugas-dengan-ketentuan-peraturan-perundang-undangan>.

F. Instrumen Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Bawaslu

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pasal 65.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 104/PUU-XXIII/2025